

## Daftar Pustaka

- Bachri, Bachtiar S. (2010) Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10(1)
- Direktorat Jenderal Pajak. (2009). Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Perubahan Ke Empat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).
- Direktorat Jenderal Pajak. (2015). Laporan Tahunan 2015. Jakarta
- Direktorat Jenderal Pajak. (2016). Laporan Tahunan 2016. Jakarta
- Direktorat Jenderal Pajak. (2017). Laporan Tahunan 2017. Jakarta
- Direktorat Jenderal Pajak. (2018). Laporan Tahunan 2018. Jakarta
- Direktorat Jenderal Pajak. (2019). PER-02/PJ/2019 Tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. Asas Pengenaan Pajak. 26 Maret 2020. [www.pajak.go.id/id/asas-pengenaan-pajak](http://www.pajak.go.id/id/asas-pengenaan-pajak).
- Direktorat Jenderal Pajak. Fungsi Pajak. 26 Maret 2020. [www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak](http://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak).
- Djuitaningsih, Tita., & Oktafani, Maulida. (n.d). Hubungan Penerapan PSAP No. 2 Tentang Realisasi Anggaran Dengan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Pemerintahan Kota Tangerang Selatan).
- Gustomo, Ma'ruf. (2018, Maret 20). Menciptakan Pajak Yang Ramah Untuk UMKM. 9 Juni 2020. <http://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-danopini/menciptakan-pajak-yang-ramah-untuk-umkm>.
- Hamzah, Lies Maria., & Devi Agustien. (2019). Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Terhadap Pendapatan Nasional Pada Sektor UMKM Di Indonesia. *JEP-Vol. 8 No.2 Juli 2019*.
- Hapsari, & Dini Wahyu. (2014). Analisis Penerapan e-SPT PPN Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Infestasi Vol.10 No.1, 36-48*.
- Hendri. (2018). Implementasi Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Vokasi Indonesia Vol. 6 No.2 Jul-Des 2018*.
- Irawan, Ade Tedi., & Tiara Purnamasari. (2017). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kualitas Hidup Pasien Penderita HIV/AIDS Di Poli Klinik Akasia RSUD Majalenka Tahun 2016. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol 2, 2033*.

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2015). Anggaran Pendapatan Belanja Negara . 10 Maret 2020. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2015>.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2016. 10 Maret 2020. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2016>.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2017. 10 Maret 2020. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kita Edisi September 2018. Jakarta
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2018. 10 Maret 2020. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (2015 s.d 2018). Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar. 20 Maret 2020. <http://www.depkop.go.id/data-umkm>.
- Kusuma, Hendra. (2018, Juni 22). Detik Finance. Diluncurkan Jokowi, Pajak UMKM 0,5% Berlaku 1 Juli 2018. 15 April 2020. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4078243/diluncurkan-jokowi-pajak-umkm-05-berlaku-1-juli-2018>.
- Kusuma, Hendra (2018, Juli 14). Detik Finance. Sri Mulyani: Pajak adalah Tulang Punggung Negara. 15 April 2020. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4114406/sri-mulyani-pajak-adalah-tulang-punggung-negara>.
- Kusumanto, Yeremia. (2018). PPh Final UMKM: Setengah Persen, Sepenuh Hati. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/pph-final-umkm-setengah-persen-sepenuh-hati/>
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Andi.
- Menteri Keuangan. (2018). PMK No.9/PMK.03/2018 Tentang Surat Pemberitahuan. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan. (2014). PMK No. 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang No. 11 tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

- Presiden Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Jakarta.
- Putera, Andri Donnal. (26 Juni 2018). Kompas.com. Melihat Detil Aturan Tarif PPh Final UMKM 0,5 Persen . 15 April 2020. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/06/26/090800326/melihat-detil-aturan-tarif-pph-final-umkm-0-5-persen?page=all>
- Putri, Trianita., David, P. E. Saerang., & Novi, S. Budiarmo. (2019). Analisis Perilaku Wajib Pajak UMKM Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Dengan Menggunakan Self Assessment System Di Kota Tomohon. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 14(1), 130-136.
- Rachman, Yoga., Satyagraha. (2019, April 30). Antara News. Belum maksimal, Sri Mulyani minta penerimaan pajak UMKM ditingkatkan. <https://www.antaraneews.com/berita/850908/belum-maksimal-sri-mulyani-minta-penerimaan-pajak-umkm-ditingkatkan>
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A Tentang Hal Keuangan.
- Safrina, Noor., Akhmad Soehartono., Agung Baruna Setiawan Noor. (2018). Kajian Dampak Penerapan PPh Final 0,5% Terhadap UMKM dalam Rangka Pencapaian Target Penerimaan Pajak Tahun 2018. SNITT-Politeknik Negeri Balikpapan 2018 ISBN 978-602-51450-1-8.
- Salebu, Jefry Batara. Kebijakan PPh Final Setengah Persen bagi UMKM (Dua Sisi Mata Uang). <https://pajak.go.id/artikel/kebijakan-pph-final-setengah-persen-bagi-umkm-dua-sisi-mata-uang>
- Sari, Rafika (2018). Kebijakan Intensif Pajak bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis* Vol. X, No.12/II/Puslit/Juni/2018.
- Setiawan, Doni Agus. (2020). Dinilai 'Tahan Banting', Kontribusi UMKM ke Pajak Diharapkan Naik. [https://news.ddtc.co.id/dinilai-tahan-banting-kontribusi-umkm-ke-pajak-diharapkan-naik-19020?page\\_y=0](https://news.ddtc.co.id/dinilai-tahan-banting-kontribusi-umkm-ke-pajak-diharapkan-naik-19020?page_y=0)
- Sirajuddin, Ilham Arief (2014). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial di Kota Makasar. *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 4 No. 1 Thn. 2014
- Suci, Tri Sukma Melati, Herman Karamoy, & Sintje Rondonuwu. (2019). Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Terhadap

Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Final Pada KPP Pratama Manado . Jurnal Riset Akuntansi 14(4), 2019, 362-370.

Suparno. (2017). Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya.

Suryani, Maslichah, & Junaidi. (2019). Pengaruh Pengalihan PP 46 2013 Menjadi PP 23 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) di KPP Pratama Pasuruan. Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, 8(02),3241.